

PEMBANGUNAN, KAUM MISKIN KOTA, DAN AKTIVISME: STUDI KASUS PENGUSURAN KAMPUNG KENTINGAN BARU, KOTA SOLO

Jurnal Analisa Sosiologi

April 2024, 13 (2): 350-372

Muhammad Aminullah Thohir¹

Abstract

Development cannot be separated from the situation of the capitalist system. Ulrich Beck explains that development will lead to a society that has a high risk of life. Development with the concept of Neoliberalism will focus on economic growth. Urban development requires land, which can be obtained from evictions. The urban poor become vulnerable groups who are often affected by evictions. This situation makes people fight back against the injustice they experience. The people who live in Kampung Kentingan Baru are a picture of the evicted residents and fight back. This research uses Qualitative research method with Critical Ethnography approach. Data were collected through interviews, participant observation, direct observation, FGD, and document study. The results of this study illustrate that the people of Kentingan Baru live in high risk. They live in a cycle of evictions that is not just one-time, some residents have been evicted before living in Kentingan Baru. People who moved from Kentingan Baru also live in villages that are also threatened with eviction. Thus, the urban poor are in a perpetual cycle of eviction. The urban poor also have a low health risk because they live in inadequate housing after the eviction. When they resist, they are also threatened in the economic aspect because they are laid off or cannot work because they have to stand guard in the village when there is news of eviction and the security aspect where they often get intimidated.

Keywords: *Activism, Urban Poor, Urban, Development*

Abstrak

Pembangunan saat ini tidak bisa dilepaskan dari situasi sistem kapitalisme. Ulrich Beck menjelaskan bahwa pembangunan akan menimbulkan masyarakat yang memiliki risiko hidup yang tinggi. Pembangunan dengan konsep Neoliberalisme akan berfokus pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di perkotaan membutuhkan lahan yang dimana bisa didapatkan dari penggusuran. Kaum miskin kota menjadi kelompok rentan yang sering terdampak penggusuran. Situasi tersebut membuat masyarakat melawan atas ketidakadilan yang mereka alami. Masyarakat yang bertempat tinggal di Kampung Kentingan Baru adalah gambaran warga digusur dan melakukan perlawanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Etnografi Kritis. Pengambilan data melalui wawancara, observasi partisipasi, observasi langsung, FGD, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa masyarakat kentingan baru hidup dalam risiko yang tinggi. Mereka hidup dalam siklus penggusuran yang tidak hanya satu kali, beberapa warga sudah pernah digusur sebelum bertempat tinggal di Kentingan Baru. Warga yang pindah dari Kentingan Baru juga tinggal di

¹Departemen Sosiologi, FISIPOL Universitas Gadjah Mada

¹ muhammadaminullahthohir@mail.ugm.ac.id

kampung yang juga terancam penggusuran. Sehingga, kaum miskin kota ini berada dalam siklus penggusuran yang tiada hentinya. Kaum miskin kota juga memiliki risiko hidup kesehatan yang rendah karena hidup dalam rumah yang tidak layak pasca penggusuran. Ketika melakukan perlawanan pun warga terancam di aspek ekonomi karena terkena PHK atau tidak bisa bekerja karena harus berjaga – jaga di kampung ketika ada berita penggusuran serta aspek keamanan dimana mereka seringkali mendapatkan intimidasi.

Kata Kunci: Aktivisme, Kaum Miskin Kota, Perkotaan, Pembangunan.

PENDAHULUAN

Pembangunan memiliki dampak negatif tersendiri bagi masyarakat, terutama dalam peralihan lahan. Pembangunan pabrik mendorong adanya alih fungsi lahan, terutama di perkotaan. Persawahan sering menjadi target alih fungsi lahan untuk pembangunan pabrik. Terkadang tidak hanya persawahan, namun juga perkampungan - perkampungan yang sudah berdiri rumah rumah juga terkena dampak penggusuran (Lukmansyah, Wasino, and Ahmad 2016). Alih fungsi lahan ini walaupun memiliki tujuan untuk membangun pabrik, tapi sesungguhnya sering mendapatkan kontra dari masyarakat, bahkan tidak jarang pemilik lahan menolak sama sekali apabila lahan sawah atau rumahnya digusur. Hal ini juga sejalan dimana modernisasi pada akhirnya juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat (Matondang 2019). Alih fungsi lahan akan memberikan pukulan kepada para masyarakat yang terdampak terutama petani dari segi ekonomi (Purwanti 2020). Lahan menjadi hal yang penting bagi pembangunan maupun masyarakat sendiri, sehingga hal ini yang nantinya apabila bertentangan akan menimbulkan konflik di antara masyarakat dengan pihak yang memiliki kepentingan untuk pembangunan baik swasta maupun negara (Alting 2013).

Tanah di perkotaan juga menjadi sasaran pembangunan. Tanah di perkotaan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan di pedesaan (Prihatin 2015). Perputaran uang di kota lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, karena berbagai kegiatan administratif, jasa, bahkan produksi kebutuhan berada di perkotaan. Faktor tersebut mendorong berbagai usaha atau pembangunan berada dekat di perkotaan (Krätke 2014). Hal ini yang pada akhirnya membuat tanah di perkotaan diperebutkan dan sekaligus memiliki harga tanah yang tinggi (Afrizal 2012).

Tanah di perkotaan akhirnya diperebutkan karena memiliki aset ekonomi. Bagi swasta dan negara tanah di perkotaan juga akan mendorong pembangunan dan modernisasi (Surya 2014). Bagi masyarakat tanah juga diperlukan untuk tempat tinggal mereka agar tidak terlalu jauh dari pusat kota yang kaya akan perputaran ekonomi. Namun, masyarakat sering kali menjadi korban pembangunan dan modernisasi, baik dibangun untuk proyek, pabrik, mall ataupun yang bernilai ekonomi. Pembangunan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari sistem masyarakat kapitalisme. Pembangunan yang bersifat kapitalistik ini akan merugikan masyarakat yang terdampak.

Masyarakat yang terdampak pembangunan kapitalistik sering kali mengalami banyak kerugian. Mereka yang terdampak akan terusir tanpa relokasi dan hanya mendapatkan ganti rugi yang kecil atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat di perkotaan yang tergusur, mereka juga sering disebut sebagai kaum miskin kota (Desmond 2012). Kaum miskin kota ini akhirnya sering kali melakukan perlawanan perlawanan terhadap penggusuran dengan berbagai cara. Kaum miskin kota mempertahankan tanahnya dari pembangunan dan modernisasi yang merugikan kehidupan mereka. Namun, dalam keberjalannya kaum miskin kota mengalami risiko risiko yang memberatkan ketika adanya penggusuran, baik dari kesehatan, keamanan keluarga mereka, dan kehidupan di hari esok. Situasi ini membuat kaum miskin kota mengalami risiko yang tinggi akibat pembangunan di perkotaan.

Kampung Kentingan Baru menjadi bukti dimana pembangunan dan modernisasi yang bersifat kapitalistik ini menghajar kehidupan mereka. Perkampungan mereka digusur dengan landasan tidak memiliki sertifikat resmi. Kehidupan 200an keluarga lebih menjadi korban modernisasi yang terjadi di era sekarang. Masyarakat kentingan baru hidup dalam risiko yang sangat tinggi dalam modernitas sekarang. Dalam tulisan ini, penulis ingin menggambarkan situasi masyarakat Kentingan Baru yang hidup dalam risiko yang tinggi melalui teori Risk Society yang dikemukakan oleh Ulrich Beck.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 sampai 2022. Lokasi utama penelitian diambil di Kampung Kentingan Baru dan juga mengambil data di

Kampung Kuburan Bong Mojo di Kec. Jebres, Kel. Jebres, Kota Surakarta. Peneliti sejak tahun 2018 hingga 2019 hidup di kampung Ketingan Baru dan tahun 2020 hingga 2022 peneliti hanya sering ke kampung tersebut. Awalnya peneliti bergabung di kelompok Ketingan Baru Berdjoeang (Kabar Djoeang) yang membantu perjuangan warga Ketingan Baru dalam melawan penggusuran. Dalam pengambilan data di Kampung Kuburan Bong Mojo juga dibantu oleh warga Ketingan Baru. Kondisi tersebut membuat peneliti bisa memahami kondisi kehidupan warga Ketingan Baru karena hidup bersama di perkampungan dan berjuang bersama warga menolak penggusuran.

Penelitian ini ingin menggambarkan secara detail mengenai masyarakat kaum miskin kota di Kampung Ketingan Baru dan juga kampung lainnya. Maka peneliti memilih metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi kritis. Etnografi kritis sering dikaitkan dengan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat, sehingga muncul untuk rasa ingin membebaskan oleh peneliti. Etnografi kritis ingin melihat bagaimana tindakan dan pengalaman manusia diciptakan melalui sistem sosial saat ini (Madison, 2020). Etnografi dipilih karena peneliti ingin memahami secara detail bagaimana situasi kehidupan masyarakat Ketingan Baru dalam situasi penggusuran. Etnografi kritis juga dipilih sebagai upaya mencerahkan kelompok yang termajinalkan yaitu dalam konteks penelitian ini ialah bagaimana kaum miskin kota terdampak atas penggusuran yang merupakan konsekuensi dari pembangunan.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 5 metode yaitu partisipasi observasi, observasi langsung, wawancara, FGD dan studi dokumen. Peneliti memilih informan warga Ketingan Baru yang juga terlibat aktif dalam perlawanan Kampung Ketingan Baru dan juga warga Ketingan Baru yang pernah hidup di kampung lain yang pernah digusur dan pindah di Kampung Kuburan Bong Mojo yang juga terancam penggusuran. Peneliti juga memilih informan dari pihak yang melakukan penggusuran yaitu kuasa hukum dan juga dinas perumahan dan agraria Kota Surakarta. Dalam kepenulisan ini untuk menjaga keamanan warga, penulis menyamarkan nama warga karena hidup dalam situasi konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kehidupan Kaum Miskin Kota di Ketingan Baru

Kampung Ketingan Baru menjadi tempat tinggal kaum miskin kota di Kota Solo. Kampung Ketingan Baru dengan luas 1,5 Ha berada di Kec. Jebres, Solo. Kampung ini secara batas wilayah Solo merupakan pinggiran kota yang berbatasan langsung dengan Kab. Karanganyar. Kampung pinggiran kota cenderung memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan pusat kota. Kampung pinggiran ini juga cenderung ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (Widjaja 2013). Walaupun berada di pinggiran, kampung Ketingan Baru berada di samping Universitas Sebelas Maret (UNS) yang dimana memiliki nilai lebih bahkan strategis karena banyaknya aktivitas dari mahasiswa di sekitaran kampus.

Dari segi ekonomi warga Ketingan Baru berada dalam situasi yang rendah. Mayoritas warga Ketingan Baru bekerja sebagai kuli bangunan yang bekerjanya harian. Upah mereka pun terbilang rendah untuk menghidupi keluarganya:

“Rata rata warga sini kerjanya kuli mas, ngikut kemana aja. Tapi ada juga yang usaha buka warung, atau jahit. Ada juga yang kerja di pabrik. Ya yang penting kerja mas, daripada engga. Apa aja dilakuin buat hidup”

(AR, Buruh Pabrik)

“Kalau upah kuli di Solo dan yang kita dapat ya dibayar harian, kalau gak kerja karena sakit atau di rumah pas ada info penggusuran ya gak dapet. Itupun perharinya 75-80 ribu” (JM, Kuli Bangunan)

Rumah yang ditinggali warga Ketingan Baru pun sempit. Penulis pernah tinggal di salah satu rumah di Ketingan Baru, dimana rumah tersebut hanya 1 ruangan bersama, dapur kecil dan kamar mandi dengan luas sekitar 4 x 5 meter. Penulis pun bersama rekan rekan mencari donasi uang untuk membangun tenda tenda untuk membangun rumah warga yang kurang layak.

“Ya habis penggusuran bingung mas, apalagi ada anak kecil. Kadang bocor kalau hujan deres. Mau pindah pun gak ada uang, jadi ya paling

ambil beberapa bahan yang bisa dipake buat rumah” (DW, Ibu rumah tangga)

“Ada yang meninggal karena tertima bangunan pas lagi nyari sisa sisa bata sama genteng yang masih bisa dipake” (JM, Kuli Bangunan)



Gambar 1. Kondisi Rumah sebelum Pengusuran

Sumber: Dokumentasi Kabar Djoeng, 2018)



Gambar 2. Kondisi Rumah setelah Pengusuran

Sumber: Dokumentasi Kabar Djoeng, 2020

Dalam kehidupan di kampung Kentingan Baru, warga juga tidak mendapatkan fasilitas seperti kampung sekitarnya.

“Disini gak ada fasilitas apapun, semuanya sendiri. Air ambil dari sumur, sampah dibakar sendiri di belakang rumah, kalau dulu di lapangan sebelum digusur. Sempet juga habis pengusuran di tahun 2020, itu warga sini gak ada listrik selama 3-4 bulan” (Dw, Ibu Rumah Tangga)

Pengusuran Ketingan Baru dan Kampung di Solo

Kampung Ketingan Baru berdiri sekitar tahun 1999 – 2000. Masyarakat ketinggian baru membangun kampung tersebut karena janji politik Walikota Surakarta periode 2000 – 2005, Slamet Suryanto. Slamet Suryanto menjanjikan tanah kepada para relawannya (yang nantinya menjadi masyarakat Ketingan Baru) yang belum memiliki tanah apabila dia menang. Hal tersebut disambut baik oleh relawan Slamet Suryanto karena tidak memiliki tanah di Kota Solo yang harganya tidak bisa dicapai oleh kondisi ekonomi mereka. Relawan relawan tersebut sebelumnya juga mendirikan rumah di tanah terbengkalai milik pemerintah, sehingga tawaran diberikan tanah sangat menguntungkan bagi relawan yang nanti menjadi masyarakat Ketingan Baru.

Tanah Ketingan Baru yang digunakan untuk perkampungan pada akhirnya mengalami konflik. Relawan yang menjadi warga Ketingan Baru tidak mendapatkan sertifikat resmi. Di tahun 2003 ada pihak yang mengklaim bahwa tanah Ketingan Baru adalah miliknya. Menurut pengklaim tanah, Ketingan Baru merupakan tanah dari beberapa individu yang tidak digunakan, sehingga dibiarkan terlebih dahulu. Namun, ketika warga meminta sertifikat aslinya tidak ditunjukkan. Hal ini yang pada akhirnya menjadi permulaan konflik pengusuran yang puncaknya terjadi pada tahun 2018 dan 2019. Slamet Suryanto selaku Walikota Surakarta mendapatkan kemenangannya atas pemilu karena dukungan para warga Ketingan Baru, tapi justru membuat warga berkonflik dengan pengklaim tanah di kemudian hari.

Konflik di Ketingan Baru berada dalam beberapa fase. *Pertama*, pada tahun 2009 salah satu pihak pengklaim tanah mengajukan gugatan ke pengadilan atas tanah, namun dinyatakan gugatan tidak terima karena tidak mengetahui batas tanahnya secara pasti. *Kedua*, pada tahun 2011 – 2012, para pengklaim tanah dibantu pemerintah Kota Surakarta merelokasi warga Ketingan Baru dipindahkan ke lahan dekat TPA Putri Cempo, yang dimana bau sampah sangat terasa. Namun relokasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena masih banyak warga yang menolak relokasi tersebut. Warga yang menolak tersebut berjumlah sekitar 50 KK, mereka ingin masalah Ketingan Baru diselesaikan melalui pengadilan. Dengan bertahannya 50 KK, membuat

Kentingan Baru masih dikuasai warga. Di tahun 2013 pemukiman Kentingan Baru didatangi masyarakat dari luar daerah dan mendirikan rumah di sana. Masyarakat tersebut berasal dari penggusuran di Kota Surakarta lainnya yang tidak diberikan relokasi, mereka adalah korban penggusuran di wilayah Semanggi. Akhirnya pasca relokasi di tahun 2011 – 2012, jumlah pemukiman di Kentingan Baru juga bertambah karena adanya warga korban penggusuran di daerah lain pada tahun 2013. *Ketiga*, selama tahun 2017 – 2018 ada beberapa kali negosiasi antara masyarakat, pemerintah kota Surakarta, dan pengklaim tanah, tapi tidak menemukan titik temu. Warga Kentingan Baru ingin menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur pengadilan, bukan negosiasi dan menerima uang tanpa relokasi. *Keempat*, akhirnya tahun 2018 & 2019 terjadi penggusuran yang menggusur 200an keluarga di Kentingan Baru. Penggusuran yang terjadi sama seperti penggusuran di wilayah lainnya yang dimana tidak diberikan relokasi, akibatnya beberapa warga yang digusur pindah ke tempat lain yaitu Kuburan Bong Mojo.

“Habis digusur itu saya ngontrak mas, ada anak bayi soalnya. Terus ada yang nawarin tanah di bong Mojo, seharga 5 juta, tapi sekarang 8 juta. Ya kami ambil. Eh, sekarang pas tahun 2022 akhir keancam digusur lagi sama pemkot.” (HR, warga Bong Mojo)

Kaum miskin kota di Kota Surakarta mengalami risiko penggusuran yang tidak henti – hentinya. Bagi warga Semanggi yang pindah ke Kentingan Baru mereka mengalami penggusuran dua kali, hal itu juga kemungkinan terjadi dengan masyarakat di Kuburan Bong Mojo. Bagi warga Kentingan Baru yang dari awal hingga penggusuran, mereka mengalami ketidakpastian tempat tinggal. Hal ini menjadikan situasi kaum miskin kota benar benar tidak bisa hidup dalam kepastian. Tanah tanah yang terlantar di perkotaan sebenarnya sudah dimiliki oleh individu dan dibiarkan untuk kepentingan ekonomi mereka sebagai asset investasi. Negara dan pemerintah kota tidak bisa memberikan jaminan pasti terhadap hak atas tanah terhadap kehidupan kaum miskin kota. Pindah dari rumah ke rumah lain, dan hidup dengan ancaman penggusuran sudah menjadi pilihan yang pasti bagi kehidupan kaum miskin kota.

Perlawanan Rakyat Ketingan Baru

Warga Ketingan Baru pada pengusuran 2018 & 2019 tidak hanya diam pasrah dalam terhadap pengusuran, mereka melawan. Ada beberapa tokoh yang aktif dalam perlawanan pengusuran Ketingan Baru yaitu Nugroho, Doni, Arif, Lilik, Ahmad, dan Rahma. Keenam orang tersebut berada di blok yang berbeda – beda, yaitu blok 1, blok 2, blok 5, dan blok 7. Warga Ketingan Baru benar benar tidak mendapatkan hak – haknya, seperti hak atas tanah, hak atas tempat tinggal layak, dan hak jaminan sosial (Thohir and Suryadinata 2022). Kondisi mereka yang terancam pengusuran dan hak yang tidak didapatkan membuat warga Ketingan Baru melakukan perlawanan.

Masyarakat Ketingan baru memiliki kesamaan dalam segi resiko hidup. Dalam membangun gerakan sosial perlunya kesamaan situasi sosial dan ekonomi untuk menggalang kekuatan sekuat mungkin (Sukmana 2016). Gerakan sosial membutuhkan banyak kekuatan individu yang bersatu dalam kelompok. Di Ketingan Baru dalam melakukan perlawanan membentuk paguyuban untuk melakukan perlawanan terhadap pengusuran yang dialami oleh mereka. Organisasi diperlukan sebagai alat untuk melakukan konsolidasi dan gerakan sosial.

Perlawanan warga tidak hanya terjadi ketika pengusuran. Dalam perlawanannya, warga sudah melakukan pada tahun 2003 ketika ada individu yang mengklaim tanah Ketingan Baru.

“Dulu tahun 2003 kita demo ke Walikota, dan dapat ijin buat atas tinggal di Ketingan Baru sama pak Slamet Suryanto.” (JM, Kuli Bangunan)

“Pas tahun 2011 – 2012 itu kan kita mau direlokasi. Tapi gak mau karena gak ada putusan sidang. Pas direlokasi pun gak dapat sertifikat, jadi gak mau. Kita cuma mau lewat sidang.” (JM, Kuli Bangunan)

“Pas relokasi itu juga sempet berantem sama warga sendiri, karena perbedaan pendapat” (AR, Buruh)

Perlawanan warga mencapai puncaknya ketika pengusuran tahun 2018 & 2019. Selama tahun 2013 – 2018 warga melakukan perlawanan dengan konsolidasi warga terus menerus untuk memperkuat kekuatan mereka dan

memahami situasi dan hak mereka sebagai kaum miskin kota. Mulai pertengahan tahun 2018 warga mendapatkan kabar ancaman penggusuran berulang kali, kondisi tersebut juga membuat warga selalu waspada. Setiap malam mereka melakukan ronda untuk melihat situasi agar tidak ada orang mencurigakan yang masuk ke Ketingan Baru. Selain itu juga warga membangun berbagai blokade jalan ketika sudah mendapati kepastian adanya penggusuran. Blokade dibuat untuk menghalau kedatangan oleh pemerintah Kota Surakarta beserta satpol PP &, kepolisian, TNI dan pihak pengklaim tanah. Setiap penggusuran warga selalu melakukan perlawanan secara fisik terhadap keamanan dari Pemerintah Kota Surakart dan juga pihak pengklaim tanah melalui organisasi preman sewaan. Perlawanan anti penggusuran juga didukung oleh gerakan mahasiswa. Bagi Castells ini yang disebut bahwa gerakan di perkotaan semakin kompleks sehingga berbagai elemen nantinya akan melembur menjadi satu untuk melawan suatu hal yang merugikan mereka, baik karena didorong kondisi yang merugikan maupun moral (Castells 1983). Gerakan anti penggusuran dilakukan secara masif demi mempertahankan wilayah warga Ketingan Baru.



Gambar 4. Penggusuran Ketingan Baru

Sumber: Dokumentasi Kabar Djoeang, 2018

Perlawanan warga Ketingan Baru pun sempat mengalami penurunan hingga terjadi konflik di internal. Tiga aktivis yang aktif di Ketingan Baru mengalami bentrok dan saling menuduh terhadap aktivitas mereka. Mereka saling mencurigai di antara mereka ada pengkhianat. Situasi ini menjadikan warga mengalami penurunan semangat, dan akhirnya satu demi satu memilih

mundur karena tidak tahan untuk bertahan di Ketingan Baru. Pasca pengusuran perlawanan warga menggunakan metode bertahan dengan rumah seadanya, tapi situasi konflik internal dan rumah yang tidak layak menjadikan warga satu satu mundur. Namun, perlawanan warga tidak mati, masih ada puluhan warga yang bertahan di Ketingan Baru hingga saat ini (September, 2023). Mereka bertahan untuk mendapatkan hak – haknya dengan berbagai risiko yang dihadapi:

“Habis pengusuran itu, sebenarnya pingin pindah mas, takut anak anak kan trauma. Tapi gak ada uang buat ngontrak. Itupun pas pengusuran saya mohon sama yang gusur rumahnya jangan dirusak”

(DW, Ibu Rumah Tangga)

“Ibu saya kadang histeris mas kalua ada info pengusuran gitu. Kemaren aja sampe ngatain tetangga karena stres.” (BB, Tukang Service

Kipas Angin)

“Tetep berjuang kalua saya mas, sampe pengadilan memutuskan warga dinyatakan kalah oleh persidangan” (JM, Kuli Bangunan)

Pembahasan

Kapitalisme, Modernitas & Risk Society

Kapitalisme, Modernitas & Masyarakat risiko (Risk Society) tidak bisa dipisahkan. Kapitalisme muncul pada abad ke-16 dimanas lahirnya institusi pasar yang nantinya dikembangkan dengan perdagangan jarak jauh. Esensi Kapitalisme ini bagi Marx adalah melipat gandakan kapital/uang (Marx 2006). Hal tersebut dilakukan dengan cara pemilik modal atau borjuasi ini membeli tenaga kerja (buruh/kelas proletariat) dan alat produksi, seperti mesin produksi atau tanah. Akumulasi kapital ini akan terus berlangsung dan bersiklus untuk mendapatkan lebih banyak uang lagi.

Dalam perkembangan kapitalisme, juga muncul modernisasi. Modernisasi secara dasar ialah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi juga mewujudkan adanya globalisasi lebih cepat, yang nantinya terbukanya pasar bebas. Modernisasi yang terjadi saat ini digunakan sistem ekonomi kapitalis menguasai dunia yang nantinya membentuk kapitalisme global (Retnowati 2017). Sebagai contoh negara negara dunia maju yang menguasai teknologi lebih cepat akan

mengembangkan teknologi mereka agar bisa digunakan oleh negara dunia ketiga sebagai komoditas yang diperjual belikan. Bahkan menggunakan teknologi mereka untuk mengambil sumber daya alam di negara dunia ketiga, dengan landasan dapat memanfaatkannya secara maksimal karena teknologi. Modernisasi yang terjadi saat ini sangat dipengaruhi oleh kapitalisme, yang memiliki orientasi untuk mengakumulasi modal melalui kemajuan teknologi.

Dalam ranah sosiologi, gagasan modernisasi juga muncul dalam sosiologi pembangunan. Dengan gagasan modernisasi yang membawa gagasan kapitalisme, otomatis pembangunan yang terjadi juga akan bercorak kapitalisme. Pembangunan yang bercorak kapitalisme ini akan menimbulkan Masyarakat risiko (Beck 1992). Masyarakat risiko menghadapi banyak ancaman dan ketidakpastian hidup atas pembangunan dan modernitas yang bercorak kapitalisme. Beck, juga menyebutkan risiko yang terjadi dapat menimbulkan kerusakan psikologis yang secara langsung bagi mereka yang terdampak, seperti masalah mentalnya yang terganggu.

Warga Ketingan Baru yang mengalami penggusuran juga diakibatkan oleh pembangunan yang bercorak kapitalisme. Pembangunan yang bercorak kapitalisme akan mementingkan aset pribadi dibandingkan aset public. Warga Ketingan Baru digusur atas ketimpangan kepemilikan tanah yang diakibatkan oleh situasi. Akhirnya warga ketinggian baru hidup dalam risiko atas kehidupan yang tidak pasti mengenai pemukiman, mengalami trauma atas penggusuran, dan ancaman atas pekerjaan mereka.

Kritik terhadap Pembangunan Kapitalis

Sejak munculnya gagasan neoliberalisme dengan pasar bebas, pembangunan diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dengan mengejar konsep pertumbuhan ekonomi pun muncul banyak kritik. Perdana Menteri Inggris saat itu, yaitu Margaret Thatcher menyebutkan tidak ada alternatif terhadap konsep pembaharuan neoliberal radikal yang membuka pasar bebas untuk upaya pertumbuhan ekonomi yang diusungnya pada tahun 1980an. Bagi Chang & Grabel justru pembangunan yang bercorak membuka pasar bebas justru menimbulkan malapetakan bagi negara berkembang (Chang & Grabel 2008). Pembangunan dengan konsep neoliberal atau kapitalisme yang berjalan saat ini di negara dunia ketiga

seperti Indonesia, justru sering membuat masyarakatnya terpuruk dan kesulitan atas pembangunan yang terjadi.

Pembangunan dan modernisasi tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial kapitalisme yang berjalan di era sekarang (Larrain 2013). Modernisasi muncul ketika mesin uap dan munculnya berbagai mesin. Kondisi ini juga menandakan berakhirnya sistem feodalisme berbasis kerajaan berganti ke liberalisme – kapitalisme. Di era feodalisme, tanah menjadi satu satunya aset yang penting karena masyarakat masih bergantung kepada tanah untuk bercocok tanam (Arisaputra 2015). Masyarakat di era tersebut bekerja sebagai petani, apabila tidak memiliki tanah maka akan mengerjakan tanah para tuan tanah yang memiliki lahan yang sangat luas. Kekuasaan di era feodalisme berdasarkan kepemilikan luas tanah (Hidayatullah 2022). Namun, di era kapitalisme tuan tanah digantikan para pemilik alat produksi yang tidak hanya berupa tanah, tapi juga mesin mesin produksi. Mereka yang memiliki alat produksi ini disebut kelas borjuasi (Marx and Engels 2009). Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidupnya pada tanah, berubah menjadi buruh pabrik menggantungkan hidupnya melalui alat alat produksi di pabrik – pabrik. Peralihan petani menjadi buruh juga menjadi titik dimana adanya modernisasi yang sampai sekarang masih bisa dilihat terutama di negara negara selatan, seperti Indonesia (Elson 2016; Habibi 2023; Rigg 2013). Setelah modernisasi, pembangunan dibutuhkan untuk membawa masyarakat tradisional ke arah modern. Pembangunan membawa perubahan yang signifikan kepada masyarakat. Alih fungsi lahan yang sebelumnya disinggung juga menjadi faktor penting dalam pembangunan. Namun, pembangunan yang serampangan dan berorientasi profit hanya akan menjadi bumerang sendiri.

Sistem kapitalisme yang dijalankan saat ini membawa pembangunan ke arah yang hanya merusak. Pabrik didirikan seharusnya hanya untuk memenuhi sesuai kebutuhan baik bersifat harian atau memang untuk mempercepat aktivitas. Pabrik garmen, alas kaki, elektronik sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Namun apabila berorientasi profit maka hanya membuat produksi yang melimpah atau bisa disebut *overakumulasi* (Clarke 2016). *Overakumulasi* ini apabila dibiarkan akan menimbulkan krisis moneter dan berdampak ke jatuhnya harga barang barang (Ridha 2016). Krisis ini sudah berkali – kali terjadi *great depression* di Eropa

(Temin 2016), Krisis Moneter di Asia Tenggara akhir 1990-an (Rasiah, Cheong, and Doner 2014), krisis karena bangkrutnya kawasan industri Detroit tahun 2008 yang memicu krisis lebih besar, dan masih banyak lagi. Kapitalisme dalam sejarahnya sudah hampir hancur berkali - kali karena krisisnya sendiri.

Dalam mengatasi krisis, kapitalisme menggunakan dua hal untuk mengatasinya yaitu dengan cara menciptakan masyarakat konsumtif dan produksi ruang hingga lintas wilayah. Masyarakat konsumtif sudah dijelaskan oleh Jean Baudrillard, dimana masyarakat mengkosumsi suatu barang produksi bukan hanya sebatas nilai kegunaan, melainkan simbol (Baudrillard 2004). Untuk mengatasi *overakumulasi* diciptakan berbagai merk dengan harga nilai yang berbeda – beda seperti pakaian, alat elektronik, bahkan makanan. Ruang ruang juga digunakan untuk mengatasi *overakumulasi*, Henry Lefebvre dan David Harvey juga sudah menjelaskan hal tersebut. Lefebvre menjelaskan bahwa ruang akan digunakan kapitalisme untuk kepentingannya (Lefebvre 1991). Hal tersebut untuk memperpanjang umurnya, sehingga ruang akan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kepentingan bertahannya kapitalisme. Ruang atau lahan digunakan untuk kepentingan pembangunan pabrik lainnya atau apapun dari hasil keuntungan *overakumulasi* di perusahaan yang dimiliki oleh kelas borjuasi untuk akumulasi modal lainnya. David Harvey juga mengembangkan gagasan mengenai ruang untuk kepentingan kapitalisme. Harvey menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan krisis yang terjadi di suatu negara karena *overakumulasi*, perlunya membuat ruang baru di negara lain (Harvey 2009). Konsep ini oleh Harvey juga dinamakan bentuk bentuk imperialisme, dimana negara lain pada akhirnya bisa mengatur negara lain dengan kekuatan modalnya melalui investasi (Harvey 2010). Dalam prakteknya munculah berbagai pembangunan yang berorientasi untuk kepentingan negara lain di suatu negara. Konsep ini juga sesuai apabila kita melihat globalisasi, dimana globalisasi muncul dengan spirit kesetaran akses teknologi. Namun, kesetaran tersebut juga membawa spirit untuk mengambil tenaga kerja murah ketika membangun sebuah pabrik di luar negaranya (Baldwin 2016). Pembangunan, modernisasi, dan globalisasi tidak lepas dari spirit kapitalisme yang memiliki

tujuan untuk mengakumulasi modal sebanyak – banyaknya lalu kemudian dapat mempengaruhi politik di suatu negeri.

Pembangunan juga memiliki dampak ekologis. Pembangunan yang melakukan penggusuran seringkali memiliki dampak langsung kepada kehidupan manusia. Masyarakat yang tergusur akan dibiarkan tanpa diberikan solusi yang pasti. Akibatnya warga yang memutuskan untuk bertahan terancam kesehatannya karena berada dalam tenda yang tidak layak dengan ancaman suhu lembab dan tikus yang bisa menggigit sewaktu – waktu dan menimbulkan virus. Penggusuran akibat pembangunan bercorak kapitalisme pada akhirnya akan membuat masyarakat terancam atas kehidupannya karena masalah kesehatan.

Dalam kondisi pembangunan, tanah menjadi aset yang sangat tinggi. Di era sekarang tanah menjadi aset yang sangat berharga bagi masyarakat (Joni 2016). Perebutan perebutan tanah menjadi hal yang sangat wajar. Namun, yang bisa memenangkan perebutan tanah hanyalah mereka yang memiliki modal banyak. Mereka yang memiliki modal akan membeli tanah yang nantinya dibiarkan terlebih dahulu dan menjadi aset sendiri sembari menunggu bertahun – tahun untuk dibangun suatu bangunan yang bernilai ekonomis maupun dijual untuk pembangunan proyek swasta maupun negara (Li 2014). Sedangkan, mereka yang tidak bisa memenangkan tanah terpaksa hanya tinggal di kontrakan, kost sewaan, atau justru mendirikan rumah di tanah yang terbengkalai. Ancaman penggusuran selalu menghantui kaum miskin kota karena mendirikan rumah di tanah yang tidak direstui oleh negara. Pembangunan yang bersifat kapitalistik ini memunculkan kaum miskin kota yang tidak bisa bersaing dengan para pemilik modal untuk mendapatkan tanah.

Kapitalisme menjadi akar masalah yang menindas kaum miskin kota. Pembangunan yang memiliki orientasi perkembangan ekonomi akan mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan hak – hak masyarakat. Pemukiman yang dinilai kumuh, kotor atau sarang kriminal akan digusur dan digantikan oleh hal yang bisa bernilai ekonomis, baik itu pabrik, wisata, maupun pemukiman elit. Warga diusir tanpa diberikan solusi yang nyata mengenai kebutuhan tempat tinggal yang dibutuhkan, sehingga akan

menimbulkan siklus menempati tanah tanah lain dan hidup dalam ancaman penggusuran terus menerus karena tidak memiliki tempat tinggal.

Risiko dalam Kedua Pilihan antara Melawan atau Mengalah

Modernitas membawa risiko tersendiri bagi masyarakat. Bagi Ulrich Beck masyarakat risiko sendiri muncul seiring menuju ke modernitas (Beck 1992). Hal tersebut muncul karena kekayaan yang tidak merata, sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan kekayaan cenderung mendapatkan risiko hidup yang tinggi. Masyarakat risiko tidak jauh dari faktor kapitalisme, yang membuat kekayaan hanya berada di segelintir orang. Alat alat produksi hanya dimiliki oleh orang orang tertentu, sedangkan mereka yang tidak memiliki alat produksi mengalami kehidupan yang tidak pasti dan risiko hidup yang tinggi. Pembangunan menjadikan masyarakat sering terkena dampak, baik itu penggusuran ataupun pencemaran nantinya. Hal ini yang membuat modernitas bercorak kapitalistik ditolak oleh masyarakat karena merugikan dan membawa risiko yang tinggi bagi mereka yang tidak memiliki alat produksi.

Modernitas membawa ketidakpastian masyarakat. Dalam prakteknya banyak masyarakat yang siap menghadapi hal tersebut. Mereka melakukan refleksi atas kejadian kejadian yang menimpa dan akan menimpa mereka dan menemukan cara untuk lepas atau menghindari risiko yang akan dihadapinya kelak. Namun, risiko semakin berkembang sesuai berkembangnya kapitalisme global. Risiko yang dihadapi masyarakat sudah bukan hanya tentang dirinya, melainkan dunia yang penuh risiko (Beck 2009). Krisis keuangan, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, politik global, dsb menjadi ancaman baru bagi masyarakat gloal. Kondisi ini membuat masyarakat global akan sangat sulit menghindari risiko dan hanya bisa menerima risiko yang dihadapinya kelak.

Kaum miskin kota di Ketingan Baru juga menjadikan salah satu contoh masyarakat risiko. Sudah dijelaskan bahwa sebelumnya masyarakat ketingan baru hidup dalam risiko penggusuran dan lingkungan yang tidak layak. Risiko masyarakat Ketingan Baru tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme yang membuat adanya perebutan tanah. Tanah menjadi nilai yang penting dalam kehidupan kapitalisme global sekarang.

Risiko juga terjadi ketika mereka melakukan sebuah perlawanan. Sudah tidak heran apabila kehidupan seorang aktivis hidup dalam bahaya. Kriminalisasi dan intimidasi sudah sering terjadi bagi para aktivis agraria dan pembela HAM (Arrsa 2014). Ancaman pembunuhan maupun suap juga sering diterima oleh para aktivis. Di Kentingan Baru perlawan juga runtuh karena risiko yang dihadapi oleh para warga. Beberapa warga memilih mundur dari perlawanan setelah mendapatkan uang dari pihak pengklaim tanah. Ada juga yang memilih mundur karena tidak tahan terhadap risiko yang dihadapi seperti tempat tinggal yang tak layak dan ancaman penggusuran. Bahkan ada beberapa warga yang terpaksa kehilangan pekerjaannya baik dipecat ataupun kehilangan tempat usaha karena penggusuran. Mereka yang dipecat karena terpaksa tidak berangkat kerja dan harus mempertahankan rumah mereka dari penggusuran. Terlalu banyak risiko yang diterima oleh masyarakat Kentingan Baru dalam melakukan perlawanan.

Warga yang mengalami penggusuran juga memiliki dampak psikologis. Warga memiliki trauma atas penggusuran. Warga memiliki kecemasan ketika didatangi oleh pihak tidak dikenal yang menanyai perihal tanah. Selain itu, juga ada warga yang histeris hingga konflik dengan tetangga karena dipantik dengan informasi mengenai penggusuran yang tidak pasti. Hal ini yang juga membuat beberapa warga enggan untuk berjuang kembali, karena memikirkan kondisi psikologis keluarganya dan memilih untuk mencari tempat yang lebih aman.

Ada yang mundur, namun tetap ada yang bertahan. Sekitar puluhan warga tetap bertahan hingga sekarang. Mereka memahami bahwa ketika menyerah juga tidak akan menyelesaikan masalah dan justru akan menerima masalah yang sama di kemudian hari. Mereka yang bertahan sedikit demi sedikit membangun kembali rumah mereka dengan bahan yang ada dan mampu untuk dibeli. Mereka memahami risiko yang diterima mereka sebagai kaum miskin kota, namun mereka memilih untuk melawan. Warga paham bahwa sistem kapitalisme juga yang membawa kehidupan mereka hingga seperti ini, sehingga perlawanan mereka tidak boleh berhenti walaupun risiko yang tinggi.

Kaum Miskin Kota dalam Perjuangan Kelas

Sistem Kapitalisme membentuk pembagian kelompok dalam masyarakat. Kelas borjuasi sebagai pemilik alat produksi, dan kelas proletariat yang tidak memilikinya. Dalam sistem kapitalisme, kelas proletariat akan ditindas oleh kelas borjuasi.

Dalam perkembangannya kelas borjuasi juga melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kekuasaan mereka agar dapat mengakumulasi modal berlipat ganda. Kelas borjuasi pada perkembangannya juga menguasai negara. Dalam prakteknya, kelas borjuasi akan terlibat dalam politik atau memasang orang, agar dapat membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Hal tersebut dilakukan agar penindasan yang mereka lakukan untuk mengakumulasi modal sah secara hukum negara. Sehingga, dalam prakteknya negara melalui hukum maupun aparat keamanan seringkali berpihak kepada kelas borjuasi, dan ikut melakukan kekerasan terhadap kelas proletariat.

Secara perspektif kelas milik Mao Zedong dan Jose Maria Sison, mayoritas warga Ketingan Baru berada dalam kelas semi-proletariat yang dimana mereka tidak terserap dalam industri modern (Sison 2021; Tse-Tung 1960). Kelas semi-proletariat secara resiko kehidupan lebih tinggi dibandingkan kelas proletariat, ketika tidak bisa bekerja di pabrik mengalami kekhawatiran dalam kehidupan keluarganya dan saat di pabrik pun tidak terlepas dari penindasan sistem kapitalisme pabrik yang semena – mena terhadap buruhnya. Kaum miskin kota juga berada dalam lapisan kelas proletariat, yang bahkan kehidupannya lebih sulit dibandingkan buruh modern.

Kelas proletariat muncul karena secara sistematis akibat kapitalisme. Tanah kaum tani yang berada di pedesaan, di rampas oleh tuan tanah (kelas borjuasi di pedesaan) dan negara untuk proyek pembangunan wisata ataupun usaha. Akibatnya kaum tani yang tidak memiliki tanah tersebut, merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya penghasilan atas sulitnya lahan di pedesaan. Kaum tani yang merantau ini beralih menjadi kelas proletariat dengan menjual dirinya ke kelas borjuasi dengan menjadi buruh di pabrik. Namun, tidak semuanya dapat bekerja, sehingga beberapa akan bekerja serabutan seperti kuli bangunan dan menjadi semi-proletariat. Kerja serabutan dengan penghasilan minim tidak bisa membuat kelas semi-

proletariat untuk membeli tanah dan rumah di perkotaan, karena harga tanah di perkotaan mahal akibat penguasaan tanah yang dilakukan oleh kelas borjuasi. Sehingga, kelas semi-proletariat ini menempati tempat-tempat yang kumuh untuk dijadikan rumah agar bisa tetap bertahan hidup di perkotaan.

Penggeseran yang menimpa kaum miskin kota seringkali melibatkan berbagai Lembaga negara. Di Kerting Baru, Walikota dengan aparat keamanannya menggeser warga kerting baru. Di sini membuktikan bahwa, negara juga akan terlibat dalam penindasan kelas proletariat. Sehingga, perjuangan kaum miskin kota tidak bisa berhenti hanya mereka yang digeser. Hal tersebut harus dilakukan dengan menggalang seluruh kelas yang tertindas akibat dominasi kelas borjuasi, yang menimbulkan berbagai penindasan bagi masyarakat.

Reforma Agraria di Perkotaan & Pemenuhan Hak Kaum Miskin Kota

Dalam aspek kebijakan, reforma agraria dan pemenuhan hak menjadi penting bagi kaum miskin kota. Reforma agraria ialah untuk membagi ulang tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, yang tanahnya diambil dari negara atau kelas borjuasi/tuan tanah yang menjadikan tanah sebagai akumulasi modal bukan kebutuhan hidup. Hal ini menjadi penting bagi kaum miskin kota agar dapat dipenuhi hak atas tempat tinggal.

Reforma agraria di perkotaan berarti memberikan tanah yang dikuasai oleh negara untuk digunakan kaum miskin kota yang tidak memiliki tanah di perkotaan. Tanah menjadi aspek penting dalam kehidupan, untuk tempat tinggal dan mencari tambahan ekonomi melalui usaha jualan di rumahnya. Ketika kaum miskin kota mendapatkan tanah sebagai tempat tinggal, otomatis hak atas jaminan hidup dan rumah tinggal yang menjadi tanggung jawab negara bisa terwujud. Negara perlu memberikan tanah untuk kepentingan masyarakat yang tidak memiliki tanah yang tinggal di perkotaan. Tanah perlu dipikirkan kembali bukan hanya untuk kepentingan kelas borjuasi untuk kepentingan akumulasi modal, namun perlu dibagikan kepada masyarakat. Ketika masyarakat memiliki tanah, maka mereka memiliki potensi untuk mengembangkan aspek kehidupannya agar lebih baik, karena masalah tanah sudah terjawab. Hal tersebut juga perlu gerakan dari

kaum miskin kota untuk meraih hak atas tanah melalui perjuangan reforma agraria.

KESIMPULAN

Kaum miskin kota merupakan masyarakat yang berada dalam risiko yang tinggi. Masyarakat Kentingan Baru sebagai kaum miskin kota hidup dalam ketidakpastian tempat tinggal. Hidup mereka dipermainkan oleh elit politik demi mendapatkan jabatan walikota. Kaum miskin kota baik dari Semanggi, Kentingan Baru, dan Kuburan Bong Mojo akan selalu dihantui oleh ancaman penggusuran. Mereka hanya berpindah dari tempat penggusuran pertama, ke tempat penggusuran lainnya karena tidak adanya jaminan hak atas tanah. Harga tanah yang mahal menjadikan mereka tidak akan mampu membeli tanah karena tanah dijadikan sebuah aset oleh individu yang memiliki kekayaan lebih dan diakumulasi olehnya untuk didirikan sebuah pabrik atau bangunan yang bernilai ekonomis. Secara lingkungan, tempat tinggal masyarakat juga tidak layak untuk ditinggali karena lembab, bocor, dan ancaman gigitan tikus. Namun, ada puluhan warga yang memilih tinggal dan melakukan perlawanan dengan cara tetap mendirikan rumah kembali dan tuntutan hukum. Mereka memahami bahwa sistem kapitalisme global yang membawa hidup mereka penuh risiko, dan tidak ada jaminan risiko mereka hilang ketika mengalah dari perlawanan di Kentingan Baru. Perlawanan warga Kentingan Baru sudah mencapai tahap kritik sistem dari kehidupan yang mereka alami, yang dimana gerakan seperti ini yang perlu dikembangkan agar membuat risiko masyarakat global berkurang. Risiko yang muncul dalam masyarakat dikarenakan sistem distribusi kekayaan yang tidak merata, sehingga memunculkan masyarakat risiko.

Situasi yang dialami kaum miskin kota di Kentingan Baru merupakan dampak dari sistem kapitalisme. Tanah menjadi salah satu aset penting yang bisa dijadikan alat produksi untuk membangun sebuah bangunan yang berorientasi profit. Bagi mereka yang memiliki modal bisa mendapatkan dari hasil membeli tanah di perkotaan untuk investasi di masa depan dengan tujuan pembangunan di masa depan. Akhirnya tanah di perkotaan memiliki harga yang mahal dan kaum miskin tidak bisa mengakses karena ketidakmampuan tanahnya. Hal tersebut mengharuskan adanya pembagian

tanah yang rata dan adil bagi masyarakat. Pembagian tanah tersebut membuat tanah bisa diakses masyarakat maupun swasta dengan keadilan yang difasilitasi negara. Pembangunan diorientasikan untuk keadilan sosial, bukan fokus ekonomi saja. Perjuangan reforma agraria harus juga diterapkan di perkotaan agar masyarakat bisa memiliki akses untuk membangun rumah di perkotaan atau didekatnya.

Dalam penelitian ini terbatas hanya kasus penggusuran di Kentingan Baru, Kota Surakarta. Limitasi dalam penelitian ini hanya bisa berfokus membahas penggusuran yang membuat masyarakat kaum miskin kota hidup dalam risiko yang akan berdampak terhadap aktivisme. Sehingga, dalam pembahasan lainnya tidak bisa secara komprehensif. Dalam penelitian selanjutnya dapat bisa diperluas dengan aspek lainnya seperti psikologis warga, ekologis, dan beberapa aspek yang belum bisa terjawab dalam tulisan ini. Dalam praktek aktivisme, tulisan ini ingin mencoba menjelaskan bahwa masalah kaum miskin kota diakibatkan oleh dominasi kapitalisme atas konsep pembangunan kapitalistik dan perampasan tanah, sehingga perjuangan kaum miskin kota juga perlu dimajukan dalam mengkritik kapitalisme secara massif dengan sektor lainnya yang juga dirugikan oleh sistem kapitalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2012. "Kontestasi Ruang: Tinjauan Sosiologi Terhadap Keadilan Ekologis." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 1(1):1-9.
- Alting, Husen. 2013. "KONFLIK PENGUASAAN TANAH DI MALUKU UTARA: RAKYAT VERSUS PENGUASA DAN PENGUSAHA." *Jurnal Dinamika Hukum* 13(2):266-82.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arrsa, Ria Casmi. 2014. "Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria." *Jurnal Yudisial* 7(1):53-69.
- Baldwin, Richard. 2016. *The Great Convergence: Information Technology and The New Globalization*. Harvard University Press.
- Baudrillard, Jean. 2004. *Masyarakat Konsumsi*. Kreasi Wacana.
- Beck, Ulrich. 1992. *Risk Society: Toward a New Modernity*. Sage Publications.
- Beck, Ulrich. 2009. *World at Risk*. Polity Press.
- Castells, Manuel. 1983. *The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements*. Edward Arnold.
- Chang, Ha-Joon and Grabel, Ilene. 2008. *MEMBONGKAR MITOS NEOLIB: Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*. INSIST Press
- Clarke, Simon. 2016. *Marx's Theory of Crisis*. Springer.

- Desmond, Matthew. 2012. "Eviction and the Reproduction of Urban Poverty." *American Journal of Sociology* 118(1):88–133.
- Elson, Robert Edward. 2016. *The End of The Peasantry In Southeast Asia: A Social and Economic History Of Peasant Livelihood, 1800-1990s*. Springer.
- Habibi, Muchtar. 2023. *Capitalism and Agrarian Change: Class, Production and Reproduction in Indonesia*. Routledge.
- Harvey, David. 2009. *Neoliberalisme Dan Restorasi Kelas Kapitalis*. Resist Book.
- Harvey, David. 2010. *Imperialisme Baru: Genealogi Dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Resist Book.
- Hidayatullah, Putra. 2022. "COLONIALISM AND PEASANT RESISTANCE IN SOUTHEAST ASIA." *Indonesian Journal of Islamic History and Culture* 3(1):132–47.
- Joni, H. 2016. "TANAH SEBAGAI ASET SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7(1):123–34.
- Krätke, Stefan. 2014. "Cities in Contemporary Capitalism." *International Journal of Urban and Regional Research* 38(5):1660–77.
- Larrain, Jorge. 2013. *Theories of Development: Capitalism, Colonialism and Dependency*. Polity.
- Lefebvre, Henry. 1991. *The Production of Space*. Blackwell.
- Li, Tania Murray. 2014. "What Is Land? Assembling A Resource for Global Investment." *Transactions of the Institute of British Geographers* 39(4):589–602.
- Lukmansyah, Nurul, Wasino, and Tsabit Azinar Ahmad. 2016. "Pengaruh Pembangunan Di Jakarta Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Betawi Tahun 1966 - 1977." *Journal Indonesia History* 5(1):26–34.
- Marx, Karl. 2006. *Kapital Vol 1*. Hasta Mitra
- Marx, Karl, and Friedrich Engels. 2009. *Manifesto Partai Komunis*. ECONARCH Institute.
- Matondang, Asnawati. 2019. "Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat." *Wahana Inovasi* 8(2):188–94.
- Prihatin, Rohani Budi. 2015. "Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta)." *Aspirasi* 6(2):105–18.
- Purwanti, Tari. 2020. "Petani, Lahan, Dan Pembangunan: Alih Fungsi Lahan Dan Dampaknya Pada Kehidupan Ekonomi Petani." *Umbara* 3(2):95.
- Rasiah, Rajah, Kee Cheok Cheong, and Richard Doner. 2014. "Southeast Asia and the Asian and Global Financial Crises." *Journal of Contemporary Asia* 44(4):572–80.
- Retnowati, E., 2017. "Ranah-Ranah Kebudayaan di Era Kapitalisme Global". *Masyarakat Indonesia*, 36(1): 221-246.
- Ridha, Muhammad. 2016. "EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEPENTINGAN KAPITAL." *Jurnal Politik Profetik* 4(1):66–83.
- Rigg, Jonathan. 2013. "From Rural to Urban: A Geography of Boundary Crossing In Southeast Asia." *TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia* 1(1):5–26.
- Sison, Jose Maria. 2021. *Upsurge of People's Resistance in the Philippines and the World: Selected Works 2020. Upsurge of People's Resistance in*

- the Philippines and the World: Selected Works 2020*. International Network for Philippine Studies (INPS).
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep Dan Teori: Gerakan Sosial*. Intrans Publishing.
- Surya, Batara. 2014. "Globalization, Modernization, Mastery of Reproduction of Space, Spatial Articulation and Social Change in Developmental Dynamics in Suburb Area of Makassar City (a Study Concerning on Urban Spatial Sociology)." *Asian Social Science* 10(15):261–68.
- Temin, Peter. 2016. "Great Depression." Pp. 144–53 in *Banking Crises: Perspectives from the New Palgrave Dictionary of Economics*, edited by G. Jones. Springer.
- Thohir, Muhammad Aminullah, and Theofilus Apolinaris Suryadinata. 2022. "PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA DALAM KONFLIK RUANG DI PERKOTAAN (Studi Kasus Masyarakat Kentingan Baru, Surakarta)." *Journal of Development and Social Change* 5(1):11–24.
- Tse-Tung, Mao. 1960. *Analysis of The Classes in Chinese Society*. Foreign Languages Press.
- Widjaja, G. P. 2013. *Kampung-Kota Bandung*. Graha Ilmu.